

IMPLEMENTASI PROGRAM POS BINAAN TERPADU (POSBINDU) LANSIA DI KELURAHAN PUUNDOHO KECAMATAN BAULA KABUPATEN KOLAKA

¹Taslim Fait, ²Fetni

^{1,2} Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Correspondent author: taslimfait6@gmail.com

Kolaka, 93517 Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

This research aims to assess and describe the implementation of the Integrated Elderly Development Post (Posbindu) program in Puundoho Village, Baula District, Kolaka Regency. The study utilized a qualitative approach with a descriptive nature. The research was conducted in Puundoho Village, Baula District, Kolaka Regency, and involved informants including the Puundoho Village Head, Puundoho Midwife, Posbindu Cadre, as well as elderly individuals and their families. Both primary and secondary data were utilized in this study. Based on the research findings, organizational indicators reveal that the implementation of the Posbindu Elderly program in Puundoho Village has not been fully effective. Specifically, the program has been less successful in providing information due to the implementing team's focus on data collection regarding the elderly. The results indicate that while the duties of midwives, nurses, and cadres are performed adequately, issues persist in health examinations, such as the additional cost of IDR 20,000 for medical equipment rental. The program's effectiveness is further hindered by its monthly implementation and a lack of understanding of the tasks and procedures by the community, which affects overall program efficiency.

Keywords: Elderly; Implementation; Policy; Public; Posbindu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menggambarkan pelaksanaan program Pos Binaan Terpadu Lansia di Kelurahan Puundoho, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka. Metode penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Puundoho, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka. Informan dalam penelitian ini meliputi Lurah Puundoho, Bidan Puundoho, Kader Posbindu Kelurahan Puundoho, serta masyarakat lansia dan keluarga lansia. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder. Berdasarkan temuan penelitian, indikator organisasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program Posbindu Lansia di Kelurahan Puundoho belum sepenuhnya efektif dalam hal pemberian informasi oleh tim pelaksana, yang lebih banyak berfokus pada pendataan lansia. Interpretasi hasil menunjukkan bahwa meskipun tugas pelaksana seperti Bidan, perawat, dan Kader telah dilaksanakan dengan baik, terdapat masalah dalam pemeriksaan kesehatan yang memerlukan biaya tambahan sebesar Rp. 20.000 untuk sewa alat kesehatan. Aplikasi program menunjukkan bahwa masyarakat menilai program ini belum optimal karena hanya dilaksanakan sebulan sekali, ditambah dengan kurangnya pemahaman mengenai tugas dan prosedur yang menghambat efektivitas program.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Lansia; Publik; Posbindu

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Kebugaran menjadi komponen kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok usia lanjut. Dalam konteks ini, Program Pos Binaan Terpadu Lansia (Posbindu Lansia) menjadi salah satu inisiatif penting pemerintah yaitu memastikan lansia mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar, Tentang "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak," yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk lansia. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan menetapkan dan memajukan serta melindungi kesehatan pada masyarakat, terutama orang usia lanjut, harus dilakukan dengan prinsip tanpa diskriminasi, partisipasi, dan keberlanjutan. Prinsip tanpa diskriminasi berarti bahwa setiap individu, termasuk lansia, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, atau budaya. Prinsip partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk memperbaiki dan memelihara kesehatan masyarakat, termasuk bagi kelompok usia lanjut. Kementerian Kesehatan telah mengimplementasikan kebijakan pelayanan yang bersahabat untuk lansia di Puskesmas melalui pendekatan Strategi Puskesmas Santun Lansia. Kebijakan ini didasarkan pada Pasal 19 dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menjelaskan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan tersedianya berbagai metode pelayanan kesehatan yang optimal, terjangkau, cakupan, dan ekonomis. Selain itu, Pasal 2 dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lansia menyatakan bahwa Standar Nasional ini dirancang untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam mendirikan dan melaksanakan lembaga serta program rehabilitasi sosial untuk lansia. Pembangunan kesehatan lansia memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal. Program Posbindu Lansia dirancang untuk memberikan pemantauan dan pelayanan kesehatan yang terfokus pada kebutuhan khusus lansia. Program ini mengikutsertakan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, kader masyarakat, dan pemerintah lokal, untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar yang diperlukan.

Di Kelurahan Puundoho, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, implementasi Program Posbindu Lansia diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup lansia dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai. Namun, pelaksanaan kegiatan ini sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari koordinasi antara pihak terkait hingga ketersediaan sumber daya yang memadai.

Berdasarkan pengamatan awal, terdapat indikasi bahwa pelaksanaan Program

Posbindu Lansia di Kelurahan Puundoho belum sepenuhnya optimal. Fakta lapangan menunjukkan bahwa di Kecamatan Baula terdapat 10 Pos Binaan Terpadu (Posbindu) yang tersebar di setiap Desa/Kelurahan, implementasi program Posbindu pada usia lanjut di Kelurahan Puundoho, Kec. Baula, Kab. Kolaka. Program Posbindu Lansia di Kelurahan Puundoho belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat lanjut usia khususnya pra lanjut usia akan sadar kesehatan di hari tua, padahal seharusnya program Pos Binaan Terpadu (Posbindu) lansia ini harus diikuti oleh lanjut usia pada setiap bulannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para petugas posyandu dan tenaga kesehatan yang terlibat di Kelurahan Puundoho Kecamatan Baula untuk mengajak masyarakat yang sudah mulai masuk pra lanjut usia dan usia lanjut untuk datang ke Pos Binaan Terpadu (Posbindu) yang biasanya dilakukan sebulan sekali, sehingga masyarakat yang telah masuk golongan pra lanjut usia maupun lanjut usia, serta banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya program kesehatan yang diperuntukkan bagi mereka melalui Pos Binaan Terpadu (Posbindu).

Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk menilai implementasi Program Posbindu Lansia di Kelurahan Puundoho, guna mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Sehingga, diharapkan studi ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan program di masa depan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan lansia di daerah tersebut.

Review Konseptual

Posbindu merupakan bentuk integrasi pelayanan kesehatan bagi lansia yang dilaksanakan di tingkat desa dalam cakupan wilayah kerja puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 2005). Posbindu bertindak sebagai pusat layanan kesehatan untuk lansia di wilayah tertentu, dikelola oleh komunitas lokal. Sementara itu, Posyandu Lansia adalah pengembangan kebijakan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi lansia, yang dijalankan melalui program Puskesmas dan melibatkan keterlibatan lansia, keluarga, tokoh masyarakat, serta organisasi sosial dalam implementasinya.

Pelaksanaan kebijakan tentunya memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan yang diterapkan. Pemahaman yang kuat, disertai dengan penerapan kebijakan yang efektif, terutama berfokus pada aspek birokrasi. Menurut Jones, seperti dikutip dalam Tahir (2014:81), implementasi kebijakan adalah proses dalam menjalankan program dengan fokus pada tiga kegiatan utama. Jones mengidentifikasi tiga kegiatan utama dalam penerapan kebijakan sebagai berikut: 1) Pengaturan, meliputi penyusunan sarana, bagian-bagian, dan cara yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program; 2) Penafsiran, yaitu mengartikan agar program dapat dirumuskan menjadi rencana yang jelas, layak dan

dapat diimplementasikan dengan tepat; 3) Implementasi, yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan penyediaan barang serta layanan.

METODE

Studi ini tergolong sebagai penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif dan dilaksanakan di Kelurahan Puundoho, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaksanaan program Posbindu Lansia di Kelurahan Puundoho belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dari Kelurahan Puundoho dan data sekunder dari wawancara dengan responden. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan metode yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2014:15-21), meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posbindu Lansia adalah pusat aktivitas masyarakat untuk layanan kesehatan bagi usia lanjut. Posyandu sebagai platform kegiatan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, akan efektif dan optimal jika dilengkapi dengan kepemimpinan yang baik, proses pengorganisasian yang tepat, kehadiran partisipan kelompok dan relawan, serta bantuan dana (Azizah, 2011).

Posbindu usia lanjut menyediakan fasilitas sosial, agama, pendidikan, pelatihan keterampilan, olahraga, seni budaya, dan layanan lainnya untuk lansia, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan hidup melalui perbaikan kesehatan dan kesejahteraan. Posbindu Lansia juga berperan dalam mendorong para lansia agar tetap aktif dan mengembangkan potensi diri mereka. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa indikator dari pelaksanaan program Posbindu Lansia, yaitu:

1. Pengaturan (Organisasi)

Organisasi merupakan unit atau struktur yang memungkinkan pelaksanaan program dan penilaian dampaknya. Kesesuaian struktur birokrasi dengan penyelenggaraan kebijakan publik sangat penting. Struktur organisasi memiliki dampak besar pada efektivitas implementasi kebijakan. Organisasi harus dilengkapi dengan struktur yang jelas, tenaga pelaksana yang terampil, serta peralatan dan dukungan perangkat yang diperlukan. Hasibuan (2011:120) mengemukakan bahwa organisasi mempengaruhi secara signifikan pelaksanaan kebijakan. Organisasi melibatkan dua komponen, yaitu istem dan tata organisasi birokrasi itu sendiri. Sistem berperan dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi yang kompleks dan terpecah-pecah dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan menciptakan prosedur yang rumit, pada gilirannya menghambat fleksibilitas aktivitas organisasi.

Pedoman yang tidak tepat, jelas, atau konsisten dapat memberikan peluang kepada pelaksana untuk mengambil keputusan sendiri. Keputusan ini bisa langsung diimplementasikan atau melalui pembuatan petunjuk tambahan untuk pelaksana di tingkat bawah. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, keputusan ini dapat menimbulkan masalah. Sebaliknya, komunikasi yang terlalu rinci dapat mempengaruhi moral dan independensi pelaksana, serta menyebabkan pergeseran tujuan dan pemborosan sumber daya seperti keterampilan, kreativitas, dan kemampuan adaptasi. Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Salah satu aspek penting dari struktur organisasi adalah kemampuannya dalam memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran tentang program yang ada (Wahab, 2002:14).

Implementasi Program Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Lansia di Kelurahan Puundoho Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka tidak terlepas dari peran aktif seluruh tim pelaksana dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya lansia, mengenai pelaksanaan program tersebut. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, diatur sebagai berikut:

1. Lanjut Usia berarti seseorang yang berumur 60 tahun ke atas.
2. Pasien Geriatri merujuk pada individu lanjut usia yang mengalami beberapa penyakit terkait kemerosotan fungsi organ dan berbagai faktor psikologis, sosial, ekonomi, serta lingkungan, memerlukan pelayanan kesehatan holistik dengan pendekatan multidisipliner
3. Kantor Kesehatan Masyarakat dikenal dengan sebutan Puskesmas, merupakan layanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan komunitas dan individu pada level dasar, dengan fokus pada tindakan promosi dan pencegahan, untuk mencapai kondisi kesehatan yang terbaik di wilayah kerjanya. Dengan demikian, tim pelaksana harus mampu menyampaikan informasi dan menjelaskan program kepada masyarakat, khususnya kepada lanjut usia, agar mereka dapat berpartisipasi dalam program ini dan meraih kualitas hidup yang lebih baik atau kesehatan yang optimal. Untuk itu, agen pelaksana seperti petugas kesehatan, bidan kader posyandu, dan pemerintah lokal harus memahami sepenuhnya maksud dan tujuan dari program ini.

Dari hasil penelitian bahwa indikator organisasi atau pengaturan yang perlu di perhatikan petugas kesehatan adalah Keteraturan dalam pembagian peran dan tanggung jawab tim, Kualifikasi dan jumlah anggota tim pelaksana, serta pelatihan yang diterima, Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan, Adanya panduan atau standar operasional untuk melaksanakan kegiatan posbindu, Partisipasi aktif

lansia dan masyarakat dalam program dan Kualitas pencatatan kegiatan, laporan hasil, dan evaluasi program.

Kemampuan pelaksanaan program Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Lansia oleh tim pelaksana juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2015 mengenai Pelayanan Kesehatan Lansia di Puskesmas, yang diatur dalam Pasal 3, yang mencakup: a. pelayanan kesehatan untuk usia pra-lanjut; dan b. pelayanan kesehatan untuk usia lanjut.

Melihat pertumbuhan jumlah lansia, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam pelayanan kesehatan lansia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, sehingga mereka dapat menikmati masa tua yang penuh kebahagiaan serta berperan dalam keluarga dan masyarakat. Sebagai wujud konkret dari pelayanan sosial dan kesehatan bagi lansia, pemerintah telah menetapkan berbagai tingkat layanan: Posbindu Lansia untuk tingkat komunitas, Puskesmas untuk layanan kesehatan dasar, dan Rumah Sakit untuk layanan kesehatan lanjutan (Fallen, 2011).

Bertambahnya jumlah penduduk lansia dapat mengakibatkan kenaikan kasus penyakit degeneratif di komunitas. Tanpa adanya langkah-langkah promotif dan preventif, beban sosial serta biaya untuk perawatan kesehatan lansia dapat menjadi cukup berat. Posbindu Lansia adalah salah satu metode untuk memberikan pelayanan kepada lansia (Profil Kesehatan Magetan, 2012). Posbindu Lansia dirancang untuk meningkatkan layanan kesehatan, mencegah gangguan kesehatan, memberikan pengobatan, serta melakukan rehabilitasi dengan berbagai kegiatan seperti Pengukuran tinggi tubuh, pemeriksaan berat badan, pengukuran tekanan darah, cek berkala, perawatan sederhana, olahraga, dan pendidikan kesehatan. Pemanfaatan Posbindu Lansia yang konsisten dapat membantu menjaga kesehatan lansia lebih baik.

Fungsi keluarga sangat menentukan dalam memajukan kesehatan dan kualitas hidup lansia, termasuk dalam hal perawatan, motivasi, inisiatif, konektivitas antar anggota keluarga, dan pencarian nafkah. Keluarga juga terlibat dalam perubahan gaya hidup menuju pola hidup sehat, memperbaiki Situasi lingkungan (fisik, biologis, sosial-budaya, ekonomi) yang mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), serta keterlibatan dalam pengawasan dan evaluasi layanan untuk lansia (Depkes, 2013). Oleh karena itu, partisipasi keluarga dalam perawatan lansia begitu krusial bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dukungan keluarga akan memotivasi lansia untuk menjaga kesehatan mereka dan secara teratur mengunjungi posyandu lansia, sehingga kondisi kesehatan lansia dapat membaik dan masa tua yang bahagia serta sejahtera dapat tercapai (Azizah, 2011).

Program pembinaan lansia di Indonesia berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam menetapkan kebijakan. Menurut Undang-

Undang RI No. 13 Tahun 1998 mengenai Kesejahteraan Lansia, layanan kesehatan dirancang untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta kemampuan lansia, termasuk penyuluhan, perawatan medis, dan pengembangan lembaga Departemen Kesehatan RI, 2005).

Untuk memastikan kegiatan berjalan lancar, sosialisasi kepada sasaran kegiatan harus dilakukan. Pada posyandu lansia, rendahnya partisipasi dan pemanfaatan layanan oleh lansia bisa disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai kegiatan posyandu di area tempat tinggal mereka. Masalah ini termasuk kurangnya pengetahuan tentang lokasi dan waktu kegiatan, jenis layanan yang tersedia di posyandu lansia, serta kurangnya pemahaman bahwa layanan tersebut diperuntukkan bagi lansia.

Posyandu Lansia, atau sering disebut Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Lansia adalah sistem layanan kesehatan dasar yang terkoordinasi untuk lansia di tingkat desa di bawah pengawasan Puskesmas. Tujuan dari Posbindu Lansia adalah untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi lansia dalam masyarakat, agar layanan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun Posyandu Lansia sangat bermanfaat, tingkat pemanfaatannya oleh lansia masih tergolong rendah. Kerja sama yang baik antara masyarakat, kader posyandu, dan petugas kesehatan sangat penting untuk mencapai pemanfaatan Posbindu Lansia secara optimal. Selain itu, penting untuk menyebarkan informasi yang akurat kepada lansia tentang program posyandu dan manfaatnya.

2. Penafsiran (Interpretasi)

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan program Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Lansia di Kelurahan Puundoho, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia seperti bidan, perawat, dan kader sudah memadai. Bidan dan kader juga telah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Posbindu Lansia, baik yang diadakan di Kendari maupun Kolaka. Selain itu, pemerintah Kelurahan Puundoho dan Puskesmas Baula telah siap mendukung program ini. Namun, masalah yang muncul adalah kurangnya ketepatan dalam pemeriksaan kesehatan oleh kader serta adanya biaya sebesar Rp. 20.000 yang dibebankan kepada masyarakat untuk penyewaan alat pemeriksaan, meskipun pemeriksaan di Posbindu itu sendiri tidak dikenakan biaya.

Menurut Pasal 138 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tujuan dari pemeliharaan kesehatan untuk lanjut usia adalah agar mereka tetap sehat dan aktif dalam aspek sosial dan ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan membantu kelompok lansia agar tetap mandiri serta produktif. Masalah kesehatan yang sering dihadapi lansia termasuk dampak penuaan, penurunan

fungsi sel (degeneratif), penurunan sistem kekebalan tubuh, serta kondisi seperti penyakit degeneratif, gangguan gizi (malnutrisi), infeksi, dan masalah kesehatan mulut dan gigi

3. Aplikasi

Implementasi, atau sering disebut dengan penerapan, mengacu pada peraturan atau kebijakan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik, diperlukan adanya prosedur kerja yang terperinci serta program kerja yang relevan, terutama dalam konteks pelaksanaan program posyandu lansia di Kelurahan Puundoho, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tujuan pemeliharaan kesehatan untuk lansia adalah untuk memastikan mereka tetap sehat serta aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan mendukung lansia agar tetap mandiri serta produktif. Selain hak kesehatan, lansia juga berhak berpartisipasi dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Peningkatan kesejahteraan lansia difokuskan pada pemberdayaan mereka, agar mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan dengan mempertimbangkan peran, keterampilan, usia, dan kondisi fisik mereka.

Tantangan utama yang dihadapi lansia meliputi masalah kesehatan akibat proses penuaan, penurunan fungsi sel tubuh (degeneratif), dan penurunan sistem kekebalan tubuh, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif, gangguan nutrisi (malnutrisi), infeksi, serta masalah kesehatan gigi dan mulut. Posbindu lansia berfungsi sebagai fasilitas layanan kesehatan untuk lansia di komunitas, yang didirikan dan dioperasikan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan dan inisiatif mereka sendiri. Aktivitas di posyandu lansia dapat dioperasikan oleh kader kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan, dengan bantuan dari tenaga teknis dari Puskesmas. Untuk memastikan pelayanan kesehatan yang maksimal di posyandu lansia, sistem lima tahapan (5 meja) direkomendasikan sebagai mekanisme pelaksanaan:

1. Tahap kesatu: mendaftarkan pasien lanjut usia sebelum di beri pelayanan atau pengobatan.
2. Tahap kedua: melakukan pencatatan semua kegiatan pasien lanjut usia serta menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan.
3. Tahap ketiga: memeriksa tekanan darah, dan melakukan pemeriksaan secara umum Kesehatan pasien lansia dan melakukan evaluasi mental pasien lansia.
4. Tahap keempat: melakukan tes laboratorium sederhana, termasuk analisis air kencing dan kadar darah pasien
5. Tahap kelima: konseling mengenai kesehatan.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 67 Tahun 2015 bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan

Masyarakat, pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk lansia harus mengikuti ketentuan program yang diatur dalam peraturan tersebut. Hal ini bertujuan agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan berdasarkan pedoman pelaksanaan serta petunjuk teknis yang berlaku. Berdasarkan hal ini, Ra (22), selaku Bidan Puskesmas Baula, menyatakan bahwa pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi lansia dilakukan baik saat pelaksanaan program posbindu maupun dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data, maka disimpulkan bahwa pemberian informasi oleh tim pelaksana belum optimal, karena kader hanya melakukan pendataan tanpa memberikan informasi yang memadai. Meskipun ketersediaan tenaga kesehatan telah terpenuhi dengan baik melalui pelatihan, terdapat masalah biaya tambahan sebesar Rp. 20.000 bagi lansia saat pemeriksaan di rumah. Pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan ketentuan, namun diperlukan prosedur kerja dan program yang lebih rinci untuk meningkatkan efektivitas program Posbindu Lansia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. Profil Kesehatan Magetan 2012. www.dinkes.magetankab.go.id. Diakses tanggal 9 November 2013 jam 09.00 WIB.
- Azizah. 2011. Keperawatan Lanjut Usia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fallen 2011. Keperawatan Komunitas. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan.
- Nugroho, Riant D. 2003. Reinfenting Pembangunan. Jakarta: PT Elex/Gramedia.
- Nugroho. 2014. Masalah Kesehatan Reproduksi Wanita. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Santika. 2013. Gambaran Kesehatan Lansia. Jakarta: EGC.
- Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- Depkes RI. 2005. Manajemen Laktasi. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan. Jakarta: Masyarakat.
- Depkes RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2010 Tentang Posbindu